TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO DI PENGADILAN TINGGI RIAU

TAPM diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh

Gelar Magister Ilmu Administrasi Publik

Disusun Oleh :

Ros Endang Naibaho

NIM. 530050932

SEKOLAH PASCASARJANA

UNIVERSITAS TERBUKA

JAKARTA

2025

ABSTRACT

THE IMPLEMENTATION OF RISK MANAGEMENT POLICY AT RIAU HIGH COURT COURT

Ros Endang Naibaho
Josejus538@gmail.com
Master Program in Public Administration
Universitas Terbuka

This research analyzes the implementation of risk management policy at Riau High Court using George Edwards III's policy implementation theory encompassing four dimensions: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. Risk management in the judicial environment is regulated through Supreme Court Secretary Decision Number 475/SEK/SK/VII/2019. The research employs a qualitative approach with single case study design. Data collection includes in-depth interviews, Risk Management Reports analysis from 2023-2025, and observation. Data analysis uses the Miles and Huberman model. Findings indicate implementation faces significant challenges across all four dimensions. Communication dimension: vertical coordination gap causes critical risk handling delays. Resource dimension: limitations in IT competency, infrastructure not fully integrated (SIPP, E-Court, SIKEP), and absence of dedicated budget. Disposition dimension: resistance at technical level despite top management commitment. Hierarchical bureaucratic structure hinders quick response. Effectiveness evaluation shows risk identification remains reactive, risk analysis uses simple methods without quantitative tools, risk response is delayed due to multilayer approval, and monitoring evaluation is not well structured. Performance impact shows mixed results: increasing awareness and systematic documentation, but impact on Key Performance Indicators not significant. Research finds a digitalization paradox where IT systems create new risks. Short-term recommendations: formalization of feedback loops, critical risk checklists, knowledge sharing sessions, and pilot Service Level Agreements. Long-term: IT-based integrated risk management system, job description redesign, dedicated budget line items, and capacity building programs. The Supreme Court needs to formalize Service Level Agreements with clear enforcement mechanisms, allocate dedicated budgets, develop a national early warning system, and adjust policies for stronger enforcement authority.

Keywords : *bureaucratic structure, high court, organizational performance, policy implementation, risk management*

ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO DI PENGADILAN TINGGI RIAU

Ros Endang Naibaho
josejus538@gmail.com
Program Studi Magister Administrasi Publik

Penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan manajemen risiko di Pengadilan Tinggi Riau menggunakan teori implementasi kebijakan George Edwards III yang mencakup empat dimensi kritis: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Manajemen risiko di lingkungan peradilan diatur melalui Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 475/SEK/SK/VII/2019. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus tunggal. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, analisis dokumen Laporan Manajemen Risiko 2023-2025, dan observasi. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan implementasi menghadapi tantangan signifikan pada keempat dimensi. Dimensi komunikasi: gap koordinasi vertikal menyebabkan keterlambatan penanganan risiko kritis. Dimensi sumber daya: keterbatasan kompetensi SDM dalam IT, infrastruktur belum terintegrasi sempurna (SIPP, E-Court, SIKEP), dan ketiadaan anggaran khusus. Dimensi disposisi: resistensi di tingkat pelaksana teknis meskipun ada komitmen puncak. Struktur birokrasi hierarkis menyulitkan respons cepat. Evaluasi keefektifan menunjukkan identifikasi risiko masih reaktif, analisis risiko menggunakan metode sederhana tanpa tools kuantitatif, respons risiko tertunda karena approval multilayer, dan monitoring evaluasi belum terstruktur. Pengaruh terhadap kinerja menunjukkan hasil mixed: meningkatkan awareness dan dokumentasi sistematis, namun dampak terhadap Key Performance Indicators belum signifikan. Penelitian menemukan paradoks digitalisasi dimana sistem IT justru menimbulkan risiko baru. Rekomendasi jangka pendek: formalisasi feedback loop, checklist risiko kritis, knowledge sharing sessions, dan pilot Service Level Agreement. Jangka panjang: integrated risk management system berbasis IT, redesign job descriptions, line item anggaran khusus, dan capacity building program. Mahkamah Agung perlu memformalisasi Service Level Agreement dengan enforcement mechanism jelas, alokasi dedicated budget, early warning system nasional, dan policy adjustment untuk kewenangan enforcement lebih kuat.

Kata kunci : implementasi kebijakan, keefektifan, kinerja organisasi, manajemen risiko, pengadilan tinggi.

UNIVERSITAS TERBUKA
SEKOLAH PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

LEMBAR PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Tugas Akhir Program Magister yang berjudul
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO
DI PENGADILAN TINGGI RIAU
adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Pekanbaru, 19 Desember 2025
Yang Menyatakan



(Ros Endang Naibaho)
NIM. 530050932

UNIVERSITAS TERBUKA
SEKOLAH PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

PENGESAHAN HASIL UJIAN SIDANG

Nama	:	Ros Endang Naibaho
NIM	:	530050932
Program Studi	:	Magister Administrasi Publik
Judul TAPM	:	Implementasi Kebijakan Manajemen Risiko di Pengadilan Tinggi Riau

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister (TAPM) Program Studi Magister Administrasi Publik Sekolah Pascasarjana Universitas Terbuka pada:

Hari/Tanggal	:	Selasa/ 10 Februari 2026
Waktu	:	14.30 - 16.00 WIB

dan telah dinyatakan **LULUS**

PANITIA PENGUJI TAPM

Tanda Tangan

Ketua Komisi Penguji
Nama : Drs. Tedjo Djatmiko, M.Pd ……

Penguji Ahli
Nama : Prof. Dr. Daswati, M.Si ……

Pembimbing I
Nama : Dr. Faizal Madya, S.IP.,M.Si ……

Pembimbing II
Nama : Prof. Dr. Ernik Yuliana, S.Pi.,MT ……

PERSETUJUAN TAPM PASCA UJIAN SIDANG

Judul TAPM	:	Implementasi Kebijakan Manajemen Risiko di Pengadilan Tinggi Riau
Penyusun TAPM	:	Ros Endang Naibaho
NIM	:	530050932
Program Studi	:	Magister Administrasi Publik
Hari/Tanggal	:	

Menyetujui :

Pembimbing II,

Prof. Dr. Ernik Yuliana, S.Pi, MT
NIP. 19720715 200501 2 012

Pembimbing I,

Dr. Faizal Madya, S.IP, M.Si
NIP. 197812182006041001

Mengetahui,

Ketua Program Studi
Magister Administasi Publik

Dr. Siti Aisyah, M.Si
NIP. 196806121999032001

Direktur
Sekolah Pascasarjana

Prof. Dr. Mamah Rumanta, M.Si.
NIP. 196305091989031002

Kata Pengantar

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat, rahmat, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tugas Akhir Program Magister (TAPM) dengan judul " Implementasi Kebijakan Manajemen Risiko di Pengadilan Tinggi Riau". Penulisan TAPM ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik pada Program Pascasarjana Universitas Terbuka.

TAPM ini bertujuan untuk menganalisis implementasi manajemen risiko di Pengadilan Tinggi Riau dan mengukur keefektifan penerapannya terhadap peningkatan kinerja organisasi. Melalui penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan peradilan, khususnya melalui penguatan sistem manajemen risiko di lingkungan peradilan.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian TAPM ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ali Muktiyanto, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Terbuka, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan pada Program Pascasarjana Universitas Terbuka.
2. Bapak Prof. Dr. Maman Rumanta, M.Si.., selaku Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Terbuka, yang telah memberikan fasilitas dan dukungan akademik selama penulis menempuh studi.
3. Bapak Drs. Tedjo Djatmiko, M.Pd, selaku Direktur Universitas Terbuka Daerah Pekanbaru yang telah memfasilitasi proses pembelajaran dan administrasi akademik selama penulis menempuh studi.
4. Ibu Dr. Siti Aisyah, M.Si, selaku Ketua Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka, yang telah memberikan arahan dan koordinasi akademik selama proses penyelesaian TAPM ini.
5. Bapak Dr. Faizal Madya, S.IP., M.Si., selaku Pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan, arahan, motivasi, dan masukan yang sangat berharga dengan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan TAPM ini dengan baik.
6. Ibu Prof. Dr. Ernik Yuliana, S.Pi., MT., selaku Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, arahan, kritik konstruktif, dan masukan yang sangat membangun sehingga TAPM ini dapat diselesaikan dengan baik.
7. Bapak/Ibu Tim Penguji TAPM, yang telah memberikan masukan dan saran perbaikan untuk penyempurnaan TAPM ini.
8. Bapak Drs. Tedjo Djatmiko, M.Pd dan Bapak Irwanzar, S.Kom, M.Kom masing-masing selaku Ketua Komisi dan Sekretaris Komisi dalam Ujian Sidang TAPM Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka, yang telah memfasilitasi proses Ujian TAPM penulis hingga selesai..
9. Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Riau beserta jajarannya, yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian di Pengadilan Tinggi Riau.
10. Segenap informan penelitian yang telah meluangkan waktu dan memberikan informasi yang sangat berharga bagi penyelesaian penelitian ini.

11. Keluarga tercinta, khususnya suami dan anak-anak, yang telah memberikan dukungan moral, doa, pengertian, dan pengorbanan waktu selama penulis menempuh studi dan menyelesaikan TAPM ini.
12. Rekan-rekan sejawat dan mahasiswa Program Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka, yang telah memberikan semangat, dukungan, dan berbagi pengalaman selama proses perkuliahan dan penyelesaian TAPM.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa TAPM ini masih memiliki keterbatasan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat menghargai kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak demi penyempurnaan TAPM ini. Penulis berharap semoga TAPM ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang administrasi publik dan manajemen risiko di lingkungan peradilan, serta dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

Pekanbaru, 19 Desember 2025
Penulis,

Ros Endang Naibaho
NIM. 530050932

RIWAYAT HIDUP

Nama	: Ros Endang Naibaho
NIM	: 530050932
Program Studi	: Magister Administrasi Publik
Tempat /Tanggal Lahir	: Situbondo, 5 Juni 1979

Riwayat Pendidikan :
Lulus SMA di Situbondo pada tahun 1997
Lulus S1 di Jember pada tahun 2002

Riwayat Pekerjaan :
Tahun 2003 s/d 2007 sebagai Pegawai di Bank BNI
Tahun 2008 s/d 2010 sebagai Calon Hakim di PTUN Kupang
Tahun 2010 s/d 2014 sebagai Hakim di PTUN Denpasar
Tahun 2014 s/d 2019 sebagai Hakim di PTUN Palangkaraya
Tahun 2019 s/d 2023 sebagai Hakim di PTUN Mataram
Tahun 2023 s/d sekarang sebagai Hakim di PTUN Pekanbaru

Pekanbaru, 19 Desember 2025
Mahasiswa,

Ros Endang Naibaho
530050932

DAFTAR PUSTAKA

A. JURNAL

Asir, M., Yuniawati, R. A., Mere, K., Sukardi, K., & Anwar, M. A. (2023). Peran manajemen risiko dalam meningkatkan kinerja perusahaan: Studi manajemen sumber daya manusia. *Entrepreneurship Bisnis Manajemen Akuntansi (E-BISMA)*, *4*(1), 32-42.

Asmar, A. F. (2025). Analisis perencanaan kebijakan e-government di Ibu Kota Nusantara: Penelitian. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, *4*(1), 6380-6390. https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i1.2806

Cahyaningtyas, S. R., & Sasanti, E. E. (2019). Penerapan manajemen risiko, penerapan good corporate governance dan kinerja ekonomi. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, *3*(2), 170-206.

Devi, S., Warasniasih, N. M. S., Masdiantini, P. R., & Musmini, L. S. (2017). The impact of voluntary disclosure, financial reporting, and corporate governance on firm value. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, *21*(3), 1567-1577. https://doi.org/10.26905/jkdp.v21i3.1323

Fasa, M. I. (2017). Manajemen resiko perbankan syariah di Indonesia. *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, *1*(2), 36-53.

Fitrianang, V. G., & Soeling, P. D. (2024). Analisis implementasi kebijakan pembinaan teritorial TNI AD untuk pencegahan konflik sosial di KODIM 0618/Kota Bandung. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, *9*(1), 69-86.

Hapsari, A. A. (2018). Pengaruh tata kelola perusahaan terhadap manajemen risiko pada perbankan Indonesia. *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi dan Bisnis*, *1*(2), 1-12. https://doi.org/10.24912/jmieb.v1i2.936

Hardiana, D. R. (2023). Implementasi desentralisasi fiskal dalam kebijakan transfer dana ke daerah pada realisasi anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2021. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, *8*(2), 321-338.

Hendawati, H. (2017). Analisis current ratio, debt to equity ratio dan total asset turn over terhadap return on equity. *Jurnal SIKAP (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing dan Perpajakan)*, *1*(1), 97-110. https://doi.org/10.32897/sikap.v1i2.52

Hidayah, R., Sukirman, S., Suryandari, D., & Rahayu, R. (2018). Peran auditor internal dalam implementasi manajemen risiko pada perguruan tinggi. *Journal of Applied Accounting and Taxation*, *3*(2), 129-133. https://doi.org/10.30871/jaat.v3i2.847

Indahsari, K., Fadilah, S., & Lestari, R. (2018). Pengaruh penerapan manajemen risiko terhadap kinerja organisasi pada lembaga perbankan syariah di Kota Bandung. *Kajian Akuntansi*, *19*(1), 53-67.

Irmalasari, L., Luthfi, M., & Baharuddin, B. (2024). Implementasi kebijakan pupuk subsidi di Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Sinjai. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, *9*(1), 137-150.

Lahope, G. (2024). Implementasi kebijakan energi nasional (KEN) Indonesia menuju 23% target bauran energi baru terbarukan (EBT) 2025. *Jurnal Darma Agung*, *30*(2), 124-135.

Lestari, R. (2013). Pengaruh manajemen risiko terhadap kinerja organisasi (Studi pada dana pensiun pemberi kerja di wilayah Jabar-Banten). *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, *13*(2), 133-151.

Mamuaja, B. (2016). Analisis efektivitas penerapan sistem pengendalian intern terhadap kinerja instansi pemerintah di Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado. *Jurnal EMBA*, *4*(1), 1348-1357.

Munawwaroh, Z. (2017). Analisis manajemen risiko pada pelaksanaan program. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, *24*(2), 71-79.

Pradana, G. Y. K., & Rikumahu, B. (2014). Analisis manajemen risiko pada departemen produksi PT Cahaya Murni Andalas Permai. *Jurnal AGORA*, *2*(1), 87-93.

Pratiwi, D., & Kurniawan, B. (2018). Pengaruh penerapan manajemen risiko terhadap kinerja keuangan industri perbankan. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, *10*(1), 73-94. https://doi.org/10.30813/jab.v10i1.988

Ramadhan, D. L., Febriansyah, R., & Dewi, R. S. (2020). Analisis manajemen risiko menggunakan ISO 31000 pada smart canteen SMA XYZ. *JURIKOM (Jurnal Riset Komputer)*, *7*(1), 91-96.

Roiyah, M., & Priyadi, M. P. (2019). Pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan dan good corporate governance terhadap return saham syariah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, *8*(6), 1-18.

Sudarmanto, E. (2020). Manajemen risiko: Deteksi dini upaya pencegahan fraud. *Jurnal Ilmu Manajemen*, *9*(2), 107-121.

Tampubolon, M. N. H. (2019). Manajemen risiko, internal kontrol, tata kelola perusahaan dan kinerja keuangan BUMN dengan maturity level departemen audit internal sebagai pemoderasi. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, *6*(2), 69-80.

B. BUKU

Agustino, L. (2016). *Dasar-dasar kebijakan publik* (Edisi Revisi). Alfabeta.

Bungin, B. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif: Aktualisasi metodologis ke arah ragam varian kontemporer*. Rajawali Pers.

Creswell, J. W. (2015). *Penelitian kualitatif & desain riset: Memilih di antara lima pendekatan* (Edisi Ketiga). Pustaka Pelajar.

Herdiansyah, H. (2015). *Wawancara, observasi, dan focus groups sebagai instrumen penggalian data kualitatif*. Rajawali Pers.

Moleong, L. J. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi Revisi). Remaja Rosdakarya.

Nugroho, R. (2017). *Public policy: Dinamika kebijakan, analisis kebijakan, manajemen kebijakan* (Edisi Kelima). Elex Media Komputindo.

Subarsono, A. G. (2016). *Analisis kebijakan publik: Konsep, teori dan aplikasi* (Edisi Revisi). Pustaka Pelajar.

Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Widodo, J. (2018). *Analisis kebijakan publik: Konsep dan aplikasi analisis proses kebijakan publik*. Media Nusa Creative.

Winarno, B. (2020). *Kebijakan publik: Teori, proses, dan studi kasus* (Edisi Revisi). CAPS (Center of Academic Publishing Service).

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2019). *Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 475/SEK/SK/VII/2019 tentang Pedoman Manajemen Risiko di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya*. Kepaniteraan Mahkamah Agung.

Republik Indonesia. (2008). *Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127. Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1133. BPKP.

Republik Indonesia. (2021). *Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 191. Sekretariat Negara.

D. DOKUMEN LAPORAN

Pengadilan Tinggi Riau. (2023). Laporan Manajemen Risiko Pengadilan Tinggi Riau Tahun 2023. Pengadilan Tinggi Riau.

Pengadilan Tinggi Riau. (2024). Laporan Manajemen Risiko Pengadilan Tinggi Riau Tahun 2024. Pengadilan Tinggi Riau.

Pengadilan Tinggi Riau. (2025). Laporan Manajemen Risiko Pengadilan Tinggi Riau Tahun 2025. Pengadilan Tinggi Riau.

E. WAWANCARA

Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Riau. (2025, Desember). Wawancara tentang implementasi manajemen risiko dan tantangan praktis dalam penanganan perkara banding [Wawancara pribadi]. Pengadilan Tinggi Riau, Pekanbaru.

Sekretaris Pengadilan Tinggi Riau. (2025, Desember). Wawancara tentang aspek sumber daya, struktur birokrasi, komunikasi kebijakan, dan disposisi dalam implementasi manajemen risiko [Wawancara pribadi]. Pengadilan Tinggi Riau, Pekanbaru.